

Energy Protectionism: Tren Meningkatnya Kebijakan Proteksionisme Energi di Uni Eropa

A. Mario Farrasda As

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: andimario171202@gmail.com

Nur Isdah Idris

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: nurisdah@unhas.ac.id

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Abstract. *This research discusses the impact of EU energy protectionism in the face of global challenges such as the Covid-19 pandemic and the energy crisis due to the Russia-Ukraine conflict. Those two major events reveal the risks of over-dependence on foreign suppliers and the lack of diversification in the EU supply chain. As a solution, the EU has implemented various policies, including RePowerE, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), and Green Deal Industrial Plan (GDIP), to reduce dependence on energy imports and increase domestic renewable energy production. Through the analysis of neoliberalism and Game Theory approaches, particularly the Prisoner's Dilemma concept, this article explores the implications of protectionist policies on international trade stability. The analysis shows that while protectionist policies can strengthen the EU's energy independence and domestic security, they also have the potential to trigger international trade tensions and protectionist retaliation from other countries.*

Keywords: *Energy Protectionism, European Union, Russia, Ukraine*

Abstrak. Penelitian ini membahas dampak proteksionisme energi Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina. Pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina mengungkap risiko ketergantungan berlebihan pada pemasok asing dan kurangnya diversifikasi dalam rantai pasok Uni Eropa. Sebagai solusi, Uni Eropa telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk RePowerE, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dan Green Deal Industrial Plan (GDIP), untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan produksi energi terbarukan domestik. Melalui analisis pendekatan neoliberalisme dan Game Theory, khususnya konsep Prisoner's Dilemma, artikel ini mengeksplorasi implikasi kebijakan proteksionis terhadap kestabilan perdagangan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan proteksionis dapat memperkuat kemandirian energi dan keamanan domestik Uni Eropa, mereka juga berpotensi memicu ketegangan perdagangan internasional dan balasan proteksionis dari negara lain.

Kata kunci: *Proteksionisme Energi, Rusia, Ukraina, Uni Eropa*

LATAR BELAKANG

Dunia saat ini dihadapkan pada fenomena *Energy Protectionism* atau gelombang peningkatan kebijakan proteksionisme energi yang menyebabkan perekonomian dunia semakin tidak terintegrasi. Pada tahun 2022, Amerika Serikat (AS) mengesahkan *Inflation Reduction Act* (IRA). Melalui IRA, AS mengalokasikan \$369 miliar untuk membantu mengembangkan industri teknologi ramah lingkungan dalam negeri. Di dunia belahan timur, Tiongkok telah lebih dahulu menerapkan inisiatif “5 Years Plan” yang berisi berbagai kebijakan subsidi strategis sehingga mereka menjadi yang terdepan dalam persaingan teknologi net-zero (Campbell et al., 2023).

Untuk merespon persaingan ini, Uni Eropa (UE) meluncurkan berbagai kebijakan tandingan untuk mendorong industri energinya. Kebijakan-kebijakan itu tertuang dalam *RePowerEU*, *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dan *Green Deal Industrial Plan* (GDIP). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk mendorong dan melindungi produksi energi terbarukan di UE melalui subsidi, pembatasan, tariff dan lainnya.

Tren ini dipicu oleh dua faktor utama yaitu Pandemi Covid-19 dan krisis energi yang dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina. Banyak industri di Eropa sangat bergantung pada impor dari negara lain, terutama dari Asia. Terhambatnya distribusi yang disebabkan oleh pandemi di wilayah-wilayah tersebut mengekspos risiko ketergantungan berlebihan pada pemasok asing, terutama ketika rute transportasi terganggu. Pandemi juga memperlihatkan kurangnya diversifikasi dalam rantai pasok. Ketika pemasok barang tidak dapat beroperasi karena pandemi, hal ini membuat bisnis-bisnis Eropa rentan terhadap kekurangan produksi. Selain itu, pembatasan fisik, larangan perjalanan, dan kebijakan lain yang dirancang untuk mencegah penyebarannya virus membawa ekonomi UE ke dalam resesi. Hal itu berkontribusi pada penurunan tajam aktivitas ekonomi internasional, menghambat baik impor maupun ekspor UE (Metelli et al., 2022).

Setelah pandemi, belahan timur Eropa kembali diguncang konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini mengekspos betapa bergantungnya UE terhadap impor gas alam dan minyak Rusia. Gangguan pasokan energi berdampak pada industri dan rumah tangga di seluruh Eropa. Selain itu, konflik ini telah mengganggu kegiatan pertanian di Ukraina, sehingga menimbulkan krisis ketersediaan dan harga produk pangan di pasar Eropa. Untuk memperburuk keadaan, negara-negara Barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia, yang mengakibatkan tindakan balasan dan pembatasan perdagangan. Sanksi ini mengganggu aliran perdagangan dan rantai pasokan, terutama bagi industri Eropa yang memiliki hubungan yang signifikan dengan Rusia (Reuters, 2022). Oleh karena itu, kebijakan proteksi untuk memastikan ketersediaan suplai dalam negeri kini menjadi fokus UE, terkhususnya energi. Melalui riset ini, penulis akan menganalisis fenomena yang terkait dengan fenomena Energi Protectionism UE dan dampaknya terhadap kestabilan hubungan perdagangan antar negara.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis dampak kebijakan proteksionisme UE dalam sektor energi, penulis akan menggunakan pendekatan neoliberalisme. Akar sejarah pendekatan neoliberalisme dapat dilacak kembali ke liberalisme klasik dimana ide ini mendukung peran pemerintah yang minim dalam ekonomi dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan John Stuart Mill

telah mendirikan dasar untuk ide-ide neoliberal. Adam Smith, dalam karyanya “*The Wealth of Nations*” (1776), menekankan pentingnya kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, seperti kebebasan untuk berusaha dan berdagang sesuai dengan kemampuan masing-masing individu (Wahab, 2013, p.22).

Pemahaman neoliberalisme sempat meredup ketika masa Perang Dunia 1 & 2 karena teori Keynesian yang menitikberatkan peran pemerintah dalam perencanaan ekonomi dianggap lebih berhasil. Namun karena perkembangan dinamika internasional dan pengaruh besar dari demokrasi, pendekatan Keynes mulai ditinggalkan dan beralih ke pendekatan pasar bebas. Lingkungan global sudah mulai percaya pada pasar bebas dan ekonomi yang lebih terbuka tanpa intervensi dari negara (Umarach, 2021).

Neoliberalisme berpendapat bahwa hanya pasar bebas yang mampu mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara efisien tanpa adanya paksaan. Pandangan ini melihat setiap intervensi pemerintah, selain dari perlindungan keselamatan individu dan hak properti, sebagai bentuk kolektivisme, termasuk proteksionisme. Neoliberalisme secara mendasar menolak proteksionisme karena dianggap menghambat integrasi global, pertumbuhan, dan efisiensi ekonomi. (Fulfer, 2024)

Proteksionisme didefinisikan sebagai kebijakan yang sengaja dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan perdagangan internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan dan mendorong industri nasional melalui kebijakan tarif dan Hambatan Non-Tarif (HNT). Kebijakan tarif melibatkan bea imbalan, anti-dumping, dan bea tambahan. Sementara itu, Hambatan Non-Tarif mencakup larangan, sistem kuota, ketentuan teknis, nilai pabean, dan peraturan kesehatan atau karantina (Wahab, 2013, p.27). Para pemikir neoliberal berpendapat bahwa proteksionisme perdagangan menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya dan meningkatkan potensi perang dagang, yang pada akhirnya merugikan konsumen secara luas.

Game Theory : Prisoner's Dilemma

Dalam menjelaskan penyebab UE menerapkan kebijakan proteksionisme energi yang bertentangan dengan ide-ide neoliberalisme, penulis akan menggali masalah tersebut menggunakan salah satu konsep dalam *Game Theory* yaitu *Prisoner's Dilemma*. *Prisoner's Dilemma* adalah contoh klasik yang mengilustrasikan situasi di mana individu yang bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri menghasilkan hasil yang kurang optimal bagi semua pihak yang terlibat (Risjord, 2000, p.99-101).

Dalam *Prisoner's Dilemma*, jika kedua pemain gagal bekerja sama, salah satu pemain mungkin merespons dengan tidak bekerja sama di masa depan, terutama jika mereka merasa

dirugikan sejak awal. Strategi yang sering digunakan dalam konteks ini disebut *tit-for-tat*. Strategi ini melibatkan tindakan yang sesuai dengan tindakan sebelumnya dari pihak lain, baik itu kerja sama maupun pembalasan yang setara (Cantyani et al., 2023, p.91-92).

Neoliberalisme, dengan penekanannya pada rasionalitas individu, kepentingan diri, dan pasar bebas, sering menggunakan referensi dari *Game Theory* untuk menganalisis perilaku ekonomi dan hasil kebijakan. Dalam analisis ini, negara dilihat sebagai aktor yang bermain dalam skenario tersebut dan ketika ia bertindak sesuai dengan kepentingan diri sendiri akan memberikan hasil yang kurang optimal dibandingkan mereka bekerja sama sejak awal.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai fenomena sosial melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan gambar, yang kemudian akan menghasilkan penjelasan deskriptif terkait fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini akan menguraikan dampak Perang Rusia-Ukraina terhadap kebijakan pasar bebas Uni Eropa.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan situs web.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu penelaahan berbagai referensi untuk menemukan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan diperoleh melalui penelitian berbasis dokumen dan penelitian berbasis internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Uni Eropa dalam Implementasi Kebijakan-Kebijakan Proteksionis di Sektor Energi : Perspektif Game Theory

Prisoner's Dilemma, salah satu konsep dalam *Game Theory* yang paling terkenal, dikonseptualisasikan oleh Merrill Flood dan Melvin Dresher pada tahun 1950. *Prisoner's*

Dilemma pada dasarnya menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana mencapai keseimbangan antara kerja sama dan persaingan, dan merupakan alat yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. (Picardo, 2024) Di dalam *Prisoner's Dilemma*, insentif individu untuk mencapai kepentingan jangka pendek bertentangan dengan kepentingan kolektif untuk mencapai manfaat jangka panjang. Masing-masing pemain yang bertindak rasional demi mengejar kepentingan individualnya, akan berakhir pada situasi yang lebih buruk bagi keduanya dibandingkan jika mereka bekerja sama (Risjord, 2000, p.99).

Pada saat pandemi, setiap negara bertindak rasional dengan memprioritaskan kebutuhan negaranya masing-masing entah itu vaksin atau komoditas lainnya. Negara produsen akan menahan komoditasnya untuk memenuhi suplai kebutuhan dalam negeri sehingga negara-negara yang tidak bisa memproduksi akan semakin menderita. Padahal dibutuhkan kerja sama kolektif untuk melewati krisis tersebut. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana vaksin diproteksi oleh negara-negara penghasil vaksin sehingga muncul istilah *vaccine nationalism*. *Vaccine nationalism* adalah strategi ekonomi untuk menimbun vaksin dari produsen dan meningkatkan pasokan di negara mereka sendiri (Murhula et al., 2022, p.95).

Negara-negara berpenghasilan tinggi mengamankan pasokan vaksin untuk populasi mereka sendiri, mengabaikan kebutuhan global dan memperburuk ketidaksetaraan distribusi vaksin. Akibatnya, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami kesulitan dalam memperoleh dosis vaksin yang memadai untuk rakyat mereka. Vaksin yang dibeli oleh negara-negara kaya cukup untuk memvaksinasi seluruh populasi mereka dua atau tiga kali, sementara negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berjuang untuk menyediakan dosis pertama vaksin bagi rakyat mereka (Riaz et al., 2021, p.1-2).

Dalam kasus vaksin Covid-19, hampir setengah dari pasokan yang direncanakan untuk tahun 2021 dari produsen utama telah diamankan oleh sejumlah kecil negara kaya seperti Australia, Kanada, Jepang, Inggris, AS, dan anggota UE. Padahal, negara-negara ini hanya mencakup 14 persen dari populasi global. Untuk mengatasi pandemi, semua negara perlu bebas dari virus sehingga penyebarannya bisa dihentikan (Chatterjee et al., 2021, p.3). Kemudian, pecah perang Rusia dan Ukraina. Perang ini mengungkap semua kerentanan ekonomi dunia dan sistem perdagangan global yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi. Guncangan harga energi terus memicu kenaikan harga di pasar makanan dan komoditas dunia, sementara gangguan rantai pasokan menyebabkan penurunan produksi dan pertumbuhan perdagangan (Kryvetska, 2022).

UE sebagai entitas yang terdampak dari kedua peristiwa ini belajar untuk mengurangi interdependensi dengan negara lain sehingga mereka memperbesar aliran subsidi industri

domestik untuk membangun tameng produksi dan suplai dalam negeri. Terdapat tiga kebijakan utama yang diluncurkan UE untuk merespon hal ini, yaitu *RePower EU*, *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), dan *Green Deal Industrial Plan* (GDIP).

1. RepowerEU

Pada Mei 2022, UE meluncurkan inisiatif REPowerEU, sebuah rencana strategis yang diinisiasi oleh Komisi Eropa untuk mengurangi ketergantungan UE pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027. Komponen utama dari rencana ini mencakup pencarian sumber energi alternatif, termasuk peningkatan impor gas alam cair (LNG) dan produksi energi hidrogen terbarukan dalam negeri. REPowerEU menetapkan target produksi hidrogen terbarukan sebesar 10 juta ton sebelum tahun 2030. Total alokasi dana untuk infrastruktur produksi hidrogen diperkirakan mencapai EUR 49 miliar. Selain mengintervensi suplai energi secara langsung, rencana ini juga mendorong partisipasi masyarakat dengan mempromosikan langkah-langkah penghematan energi di berbagai sektor, termasuk bangunan, industri, dan transportasi, guna mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan (European Commission, 2022).

2. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) adalah kebijakan tarif impor pada barang-barang dengan intensitas karbon tinggi dari luar negeri. Tarif ini diterapkan sebagai pajak impor yang dibayar oleh importir saat produk masuk ke UE, khususnya melalui pembelian sertifikat yang mewakili emisi yang terkandung dalam barang-barang tersebut. Harga sertifikat ini dipengaruhi oleh nilai karbon dalam *Emission Trading System* (ETS) UE. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan UE tidak dirugikan oleh persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan-perusahaan dari negara-negara dengan regulasi emisi yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini telah menimbulkan keberatan dari negara-negara berkembang yang berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kapasitas atau infrastruktur untuk mematuhi aturan ini. Meskipun kontribusi impor dari negara-negara ini ke UE relatif kecil, pemerintah mereka merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan lebih merupakan tindakan proteksionisme daripada upaya untuk mengurangi emisi global (Benson et al., 2023).

3. Green Deal Industrial Plan (GDIP)

Green Deal Industrial Plan (GDIP) adalah peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri yang berusaha mencapai netralitas karbon di Eropa dan mendukung peralihan yang cepat menuju netralitas iklim pada tahun 2050. Fokusnya adalah menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan industri bersih, memastikan akses yang memadai ke bahan mentah kunci, dan merangsang inovasi berkelanjutan.

Komponen intinya termasuk penyederhanaan proses perizinan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, peningkatan keterampilan yang dibutuhkan untuk peralihan energi melalui pelatihan, dan subsidi untuk proyek-proyek energi terbarukan. Untuk mewujudkan rencana yang ambisius ini, Uni Eropa telah mengalokasikan dana sebesar €270 miliar (Carbon Herald, 2023).

GDIP menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan Inisiatif Rekonstruksi dan Amanah (IRA). Undang-undang ini akan mengurangi ketatnya regulasi UE terkait bantuan negara, yang membatasi subsidi domestik yang dapat diberikan, sehingga proyek-proyek energi bersih dapat menjadi lebih terjangkau. Sebelumnya, UE telah melonggarkan peraturan bantuan negara pada awal pandemi COVID-19, dan mengambil langkah serupa setelah invasi Rusia ke Ukraina (Kaufman et al., 2023, p.23).

Hal ini tentunya merupakan salah satu langkah positif bagi UE untuk mencapai kemandirian energinya. Namun, subsidi masif dan kebijakan proteksi ini membawa implikasi yang tidak terlalu menguntungkan bagi negara-negara berkembang dan terbelakang. Negara-negara berkembang dan terbelakang tidak memiliki kapasitas untuk menggelontorkan subsidi sebesar UE, AS, maupun Tiongkok, sehingga mereka menghadapi tantangan besar dalam upaya mengembangkan industri hijau dan mencapai kemandirian energi. Ketidakmampuan untuk berkompetisi dengan subsidi besar dari negara-negara maju akan menyebabkan negara-negara ini semakin tertinggal dalam hal teknologi dan infrastruktur energi.

Ketertinggalan tersebut akan menjadi insentif bagi negara-negara berkembang dan terbelakang untuk kembali menggunakan energi tidak ramah lingkungan karena harga yang lebih murah dan pasokannya yang melimpah. Hal ini akan memperlambat proses penanganan masalah perubahan iklim. Padahal, kerja sama internasional adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan iklim. Semua negara harus bersama-sama, bahu-membahu melakukan transisi ke energi ramah lingkungan.

Situasi ini menunjukkan bagaimana tindakan individualistik dapat menyebabkan hasil kolektif yang lebih buruk, sebuah prinsip inti dari *Prisoner's Dilemma*. Jika negara-negara bekerja sama mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik untuk semua pihak, seperti yang terlihat dalam upaya untuk mengakhiri pandemi dan memitigasi dampak perang di Ukraina terhadap ekonomi global. Sayangnya, kecenderungan proteksionisme dan subsidi domestik yang masif, seperti yang terlihat dalam inisiatif *REPowerEU*, CBAM, dan GDIP, meskipun positif bagi kemandirian energi UE, dapat memperburuk ketidaksetaraan global dan upaya penanganan iklim.

Analisis Implikasi Kebijakan Proteksionisme Uni Eropa Terhadap Hubungan antar Negara: Perspektif Neoliberalisme

Kebijakan proteksionis dapat memprovokasi tindakan pembalasan dari negara lain. Jika satu negara memberlakukan tarif atau pembatasan, negara lain mungkin merespons dengan cara yang sama, yang mengarah pada perang dagang. Contohnya adalah tindakan yang diambil oleh AS terhadap Tiongkok pada Juli 2018, dengan menerapkan tarif langsung atas produk Tiongkok atas alasan praktik perdagangan yang dianggap tidak adil dalam transfer teknologi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan inovasi. Bulan September pada tahun yang sama, Presiden Trump mengumumkan peningkatan tarif pada produk Tiongkok senilai \$200 miliar. Sebagai tanggapan, Tiongkok melakukan balasan dengan menerapkan kebijakan tarif serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Sejak pengumuman tersebut, Tiongkok bahkan meningkatkan tarif perdagangan dari \$50 miliar menjadi \$121 miliar. Ini adalah contoh konkret bagaimana tindakan proteksionis dari satu negara dapat memicu respons serupa dari negara lain dan memperburuk ketegangan perdagangan internasional (Yilmaz, 2020, p.8-10).

Contoh lainnya adalah kasus UE dan Indonesia. Pada tahun 2018, UE mengadopsi *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang melarang penggunaan minyak sawit di wilayahnya, dengan alasan bahwa produksi minyak sawit dianggap merusak lingkungan, menyebabkan deforestasi, kerusakan ekosistem dan biodiversitas. Indonesia, salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, menjadi salah satu negara yang paling vokal menentang kebijakan ini. Indonesia mengajukan protes melalui World Trade Organization (WTO), menganggap larangan tersebut sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil. Namun, meskipun menghadapi berbagai penolakan, hingga tahun 2024, Uni Eropa belum melakukan perubahan pada kebijakan larangan tersebut terhadap penggunaan minyak sawit untuk biodiesel di wilayahnya. Indonesia menafsirkan implementasi RED II sebagai strategi perdagangan yang dimaksudkan untuk mengurangi impor bahan bakar hayati (biofuel), sehingga pasar bahan bakar hayati di UE tidak terpengaruh oleh minyak sawit (Umarach, 2021, p.105).

Melihat resiliensi dari UE, Indonesia mengambil langkah serupa dengan menerapkan kebijakan hilirisasi pada tahun 2020, yang mencakup larangan ekspor bijih nikel. Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran utama dalam pasokan global, menyumbang sekitar 37% dari total produksi nikel atau sekitar 2,7 juta ton metrik. Dengan melarang ekspor, Indonesia bermaksud untuk meningkatkan nilai tambah produknya dengan melakukan proses hilir peleburan mineral, sehingga meningkatkan nilai nikel yang diekspor untuk memperoleh keuntungan maksimal. Selain alasan ekonomi, Indonesia juga mengklaim

bahwa langkah ini diambil untuk menjaga cadangan bijih nikel dengan membatasi jumlah yang diekspor (Cantyani et al., 2023, p.88).

Mulai 1 Januari 2020, Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel, yang berdampak pada peningkatan signifikan impor bijih nikel dari Rusia ke UE. Pada tahun 2021, nilai impor nikel Rusia ke UE mencapai \$2,5 miliar dan meningkat menjadi \$3,39 miliar pada tahun 2022. Namun, perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 menyebabkan situasi sulit dalam pasokan sumber daya dan mengakibatkan lonjakan harga. Sebagai salah satu pengimpor nikel terbesar, UE merasa dirugikan oleh situasi ini dan memutuskan untuk menanggapinya dengan mengajukan gugatan ke WTO terhadap tindakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia. Indonesia dianggap kalah dalam gugatan tersebut, dan saat ini mengajukan banding untuk mencoba membatalkan keputusan tersebut (Cantyani et al., 2023, p.94).

Dari perspektif neoliberalisme, kebijakan proteksionisme Uni Eropa yang semakin menguat menunjukkan dinamika kompleks dalam hubungan internasional dan perdagangan global. Tindakan proteksionis seperti larangan penggunaan minyak sawit dalam RED II dan pembatasan ekspor bijih nikel oleh Indonesia, mengilustrasikan bagaimana negara-negara menggunakan regulasi lingkungan dan sumber daya untuk melindungi industri domestik mereka.

Namun, tindakan ini juga memicu ketegangan perdagangan dan risiko perang dagang, sebagaimana terlihat dari respons balasan dari negara-negara yang terdampak seperti Indonesia dan Tiongkok. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa meskipun tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah perlindungan lingkungan dan optimalisasi nilai sumber daya, efek sampingnya sering kali berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan politik global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan proteksionisme ini dan mencari solusi yang lebih inklusif dan adil dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan perdagangan bebas yang adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proteksionisme energi di Uni Eropa menjadi strategi penting dalam menanggapi tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan krisis energi akibat konflik Rusia-Ukraina. Melalui kebijakan seperti RePowerEU, CBAM dan European Green Deal Industrial Plan, UE berusaha mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan produksi energi terbarukan domestik. Meskipun langkah-langkah ini dapat memperkuat kemandirian energi dan keamanan domestik, mereka juga membawa risiko ketegangan perdagangan internasional dan potensi ketidakstabilan ekonomi global.

Analisis menggunakan pendekatan neoliberalisme dan Game Theory terutama konsep Prisoner's Dilemma, menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis dapat merusak integrasi ekonomi global dan memicu balasan proteksionis dari negara lain. Oleh karena itu, penting bagi UE untuk menyeimbangkan antara perlindungan lingkungan, kemandirian energi, dan perdagangan bebas yang adil.

Untuk mencapai tujuan iklim global dan menjaga stabilitas hubungan internasional, UE perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya mendukung energi terbarukan dan keamanan domestik tetapi juga mempromosikan kerjasama internasional dan perdagangan bebas yang adil. Dengan demikian, UE dapat mengatasi tantangan energi dan lingkungan saat ini sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas global.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab. (2013). *Ekonomi Internasional*. University Press.
- Bashige Murhula, P. B., & Balgobind Singh, S. (2022). The impact of COVID-19 vaccine nationalism on global health and human rights to health standards. *SAGE Journals*, 22(1), 93–101.
- Benson, E., Majkut, J., Reinsch, W. A., & Steinberg, F. (2023). Analyzing the European Union's carbon border adjustment mechanism.
- Campbell, L., & Gritz, A. (2023, May 21). Europe's green industrial policy and the United States' IRA. *DGAP*.
- Cantyani, K., Matthew, J., Jans, S. R., & Huang, A. (2023). The Prisoner's Dilemma: Indonesia and the European Union in export commodity disputes. *Jurnal Sentris*, 4(1), 86–100. <https://doi.org/10.26593/sentris.v4i1.6794.86-100>
- Cantyani, K., Matthew, J., Rainaputri, S., & Huang, A. (2023). The Prisoner's Dilemma: Indonesia and the European Union in export commodity disputes. *Jurnal Sentris*, 4(1).
- Chatterjee, N., Mahmood, Z., & Marcussen, E. (2021). Politics of vaccine nationalism in India: Global and domestic implications. *Forum for Development Studies*, 48(1).
- Dutta, P. K., Granados, S., & Ovaska, M. (2022, February 16). Russian gas threat in Europe. *Reuters*.
- European Commission. (2022). *REPowerEU Plan*.
- Fulfer, J. (2024, March 14). Milton Friedman: The economist who shaped neoliberalism in the Cold War era. *The Economic Historian*.
- Kaufman, N., Saha, S., & Bataille, C. (2023). Green trade tensions.
- Kryvetska, O. (2022, September 26). Russia's aggression against Ukraine: Global trade implications after 7 months of war. *International Institute for Sustainable Development*.

- Lottici, M. V., Galperín, C., & Hoppstock, J. (2014). “Green trade protectionism”: An analysis of three new issues that affect developing countries. *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, 2(2), 1450016. <https://doi.org/10.1142/s234574811450016x>
- Marhold, A.-A. (2023). Towards a ‘security-centred’ energy transition: Balancing the European Union’s ambitions and geopolitical realities. *Journal of International Economic Law*, 26(3), 757–764. Oxford University Press.
- Metelli, L., Mancini, M., Gerinovics, R., Gunella, V., & Attinasi, M. G. (2022, June 8). Global supply chains rattled by winds of war. *The Centre for Economic Policy Research*.
- Picardo, E. (2024, January 26). The Prisoner’s Dilemma in business and the economy. *Investopedia*.
- Riaz, M. M. A., Ahmad, U., Mohan, A., dos Santos Costa, A. C., Khan, H., Babar, M. S., Hasad, M. M., Essar, M. Y., & Zil-E-Ali, A. (2021). Global impact of vaccine nationalism during COVID-19 pandemic. *National Library of Medicine*.
- Risjord, M. (2000). *Woodcutters and witchcraft: Rationality and interpretive change in the social sciences*. State University of New York Press.
- Trendafilova, P. (2023, February 4). EU presents \$270 billion green deal industrial plan to keep up the energy transition. *Carbon Herald*.
- Umarach, M. S. (2021). The phenomenon of green trade protectionism: Analysis of the EU palm oil import ban in the ASEAN region. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 31(2), 103. <https://doi.org/10.20473/jeba.v31i22021.103-116>
- Yılmaz, D. (2020). From protectionism to trade wars: Their effects observed through financial markets. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.11611/yead.606693>